

**KERJASAMA PEMERINTAH DESA PASAR BARU PANGEAN DENGAN CAMAT
DALAM MENUNTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PANGEAN MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2016**

Oleh:

Taufik Widiya Saputra

Email: Taufikwidiyasaputra11@gmail.com

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax 0761-63277

Abstract

This research entitled "Cooperation of Village Government Pasar Baru Pangean With Camat In Completing Poverty In Pangean Sub District Through Family Hope Program (PKH) Year 2016". This research is based on the cooperation between the Village Government and the Camat in solving the existing poverty in Pasar Baru Pangean Village through Family Hope Program (PKH) launched by the Ministry of Social Affairs to reduce the poverty index. The formulation of the problem in this research is how the cooperation of the Village Government of Pasar Baru Pangean with Camat in completing poverty through Family Hope Program (PKH) in Pangean Subdistrict and also the implementation of Family Hope Program (PKH) in Pangean Subdistrict. The problems that exist in this research is to know the form of cooperation between Village Government of Pasar Baru Pangean and Camat in solving the poverty found in Pasar Baru Pangean Village and want to know the implementation of Family Hope Program (PKH) Program in Kecamatan Pangean. The method used in this study is a qualitative method that describes the data descriptively. Data collection techniques used were in-depth interviews, documentation and observation, while other required data came from research informants and supported by supporting documents related to this research.

Based on the results of research that has been done show that there are three forms in cooperation Village Government Market New Pangean with Camat in poverty alleviation through family program harrapan (PKH) in 2016 that is 1. Coordination Shape, which coordination is done in two ways that is directly and indirectly, 2.The form of Data Collection to encourage the synchronization of data every year, and 3.Bentuk Pembinaan by the Camat to the Village Government Pasar Baru Pangean with the form of facilitating the guidance of PKH activities in 2016. Implementation of family planning program (PKH) found in Pangean sub-district in 2016 generally has no significant obstacles. There is only a problem with margins of data error in population resuscitation. The data is not always accurate or not always 100% true, there must be a mistake, because 100% accurate data is god's data as well as changes in economic status to the community.

Keyword: Cooperation, Poverty Alleviation, PKH Implementation

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi tinggi. Kemiskinan akan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan dan persatuan. Dengan memperhatikan kondisi yang seperti ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan program yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan di negara Indonesia. Dengan demikian, dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program keluarga harapan (PKH) diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 66A/LJS/04/2012 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan Program Keluarga Harapan Di Provinsi Pelaksanaan PKH Tahun 2012 “Bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem jaminan sosial dan memutuskan rantai kemiskinan antar generasi, Direktorat Jaminan Sosial telah melaksanakan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2007”, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No. 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH)” tanggal 21 September 2007, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang

“Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008, Surat Keputusan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 78/SK/JS/IX/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Pengembangan Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Di 50 Kabupaten/Kota Pada 25 Provinsi Tahun 2012 ” Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib operasional pelaksanaan Program Keluarga Harapan agar dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka dipandang perlu adanya pendamping program keluarga harapan (PKH)”.

Dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan terdapat pada Poin Lampiran Ke-1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi yang terdapat pada Poin Lampiran Ke-46 tentang Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial “ Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Program keluarga harapan (PKH) adalah asistensi sosial kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi kualifikasi

tertentu (RTM kronis, rentan terhadap goncangan) dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat mengubah perilaku individu maupun masyarakat.

Sasaran program keluarga harapan ini diutamakan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki komponen sebagai berikut:

1. Pendidikan,
2. Kesehatan, dan
3. Kesejahteraan social.

Tujuan utama dari program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin. Program keluarga harapan (PKH) ini mulai dilaksanakan pertama kali paada tahun 2007 dan diberlakukan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2012. Atas dasar Pepres No. 15 tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Undang-undang No. 11 tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 66A/LJS/04/2012 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan Program Keluarga Harapan di Provinsi Pelaksanaan PKH Tahun 2012.

Di Kabupaten Kuantan Singingi masih tinggi tingkat kemiskinan dan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan bisa menuntaskan kemiskinan terutama di Desa Pasar Baru Pangean yang berada di Kecamatan Pangean. Di Kecamatan Pangean, indeks angka kemiskinan masih tinggi hal itu dilihat dari ekonominya.

Di Kecamatan Pangean khususnya di Desa Pasar Baru Pangean masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan tidak mendapat program keluarga harapan (PKH). Hal itu dikarenakan ketidak tepatannya sasaran bagi penerima program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Pangean, sehingga masyarakat kurang mampu yang ada di Kecamatan Pangean pun merasa cemburu kepada masyarakat yang penerima program keluarga harapan (PKH) dan mempertanyakan kepada

Pemerintah Desa atas ketidak dapatnya bantuan program keluarga harapan (PKH) ini.

Dari hal itu pihak Pemerintah Desa harus ada pembinaan oleh Camat mengenai masalah itu, dan pihak pendamping dan Kecamatan harus sosialisasi, mensinkronisasikan, mengkoordinasikan dan mendata ke lapangan demi ketepatan sasaran dalam program ini. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean harus bekerjasama dengan Camat dalam menangani angka kemiskinan dimana kerjasama ini harus fokus pada mensinkronisasikan, mengkoordinasikan dan pendataan agar program keluarga harapan (PKH) ini efektif di Kecamatan Pangean. Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean harus optimal dalam pensosialisasian dan pendataan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Desa dan Camat pun berperan penting dalam kesejahteraan masyarakatnya dalam menuntaskan kemiskinan di Kecamatan Pangean khususnya di Desa Pasar Pangean melalui program keluarga harapan (PKH). Dimana indikator permasalahannya terkait hubungan Camat dengan Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean adalah :

- a) Kurangnya komunikasi antara Camat dengan Pemerintah Desa dalam pendataan dalam pelaksanaan PKH untuk menuntaskan kemiskinan,
- b) Pemerintah Desa tidak selalu mengkoordinasikan dalam pendataan penduduk ekonomi miskin dengan Camat, sehingga tidak tepat sasaran dalam menentukan masyarakat miskin dalam pelaksanaan PKH.

Dari indikator tersebut dimana tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan Camat yang paling utama yaitu membina masyarakat supaya berkehidupan layak. Akan tetapi seharusnya kerjasama Pemerintah Desa dengan Camat sangat fokus dalam menuntaskan kemiskinan di Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean. Harus ada pembinaan dan

mensinkronisasikan serta mengkoordinasikan dalam pendataan ulang penduduk dalam menentukan penerimaan program keluarga harapan (PKH).

B. KERANGKA TEORI

1. Kemiskinan

Menurut Friedmann (1979: 101), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau aset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan keterampilan dan informasi yang berguna.

Chambers dalam Nasikun (2001: 1) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi baik secara geografis maupun sosiologis, yaitu:

- 1) Kemiskinan (*proverty*),
- 2) Ketidak berdayaan (*powerless*),
- 3) Ketentruman menghadapi situasi darurat (*state of emergency*),
- 4) Ketergantungan (*dependence*), dan
- 5) Keterasingan (*isolation*).

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindakan kriminal, ketidak berdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Masih menurut Chambers, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Apabila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan Relatif

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan Kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan Struktural

Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Dan menurut Kartasasmita dalam Rahmawati (2006: 4) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu:

- 1) Rendahnya taraf pendidikan,
- 2) Rendahnya derajat kesehatan,
- 3) Terbatasnya lapangan kerja, dan
- 4) Kondisi keterisolasian.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan perpektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan sosial (*sosial protection*). Setiap manusia, kaya maupun miskin, tinggal di Negara maju maupun negara berkembang senantiasa dihadapkan pada resiko yang mengancam pada kehidupannya setiap saat. Perlindungan sosial adalah skema yang di rancang secara terencana oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi anggotanya

dari berbagai resiko dalam kehidupannya. Secara konseptual, perlindungan sosial mencakup: Bantuan sosial, Asuransi sosial, Kebijakan-kebijakan pasar kerja (*labourmarket policies*), Mekanisme dan jaring pengaman sosial berbasis masyarakat. DepSos menyebut sistem perlindungan ini dengan istilah *Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)*. Usman Sunyoto (1998:125)

Kehadiran negara bukan saja dilihat dari sekedar ketakutan akan terjadinya kerusakan sosial. Lebih jauh, pemenuhan kebutuhan untuk mendapatkan standar hidup yang layak adalah hak asasi manusia. Ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 25 ayat 1 berbunyi ;*setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga*, juga konvensi internasional hak-hak ekonomi, sosial, budaya pasal 11 yang berbunyi : *Negara-negara penandatanganan konvenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan*. Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun bantuan dari negara donor, semuanya mempunyai program masing-masing.

Program pemberdayaan pemerintah, program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat dari dua sisi.

Pertama, Program pemberdayaan masyarakat miskin sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Program ini lebih menekankan pada upaya penumbuhan unit usaha baru akibat ketiadaan lapangan kerja, sungguh pun bekerja tetapi tidak mencukupi. Program ini memerlukan proses panjang dan banyak kendala yang dijumpai karena memerlukan pembinaan dan pengawasan ketat. Disisi lain program pemberdayaan masyarakat miskin memperhatikan beberapa hal penting diantaranya bantuan usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, pendidikan anak-anak rumah tangga miskin, kesehatan

dan lingkungan tempat tinggal serta rumah layak huni. Oleh karena itu program ini memerlukan biaya dan rentang waktu yang relatif lama dan memerlukan perencanaan yang terintegrasi antar instansi yang terkait. Pengurangan angka penduduk miskin merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi setiap pemerintah daerah.

Kedua, Program ekonomi rakyat. Program ini berupaya mengembangkan sektor riil yang memiliki potensi untuk dikembangkan berbagai sektor baik pertanian, industri kecil dan menengah, perdagangan dan jasa. Program ini berfokus pada upaya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari segi pemodal, manajemen usaha, penerapan teknologi dan pemasaran usaha. Memperhatikan kendala yang dihadapi UMK merupakan bagian terpenting untuk memberdayakan UMK dalam tatanan perekonomian daerah. Zulkarnain (2010 : 17).

3. Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu objek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada objek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa

menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras. Pamudji (1985 : 12-13).

Terjadinya kerja sama yaitu terdapatnya kesamaan tujuan, menurut Pamudji (1985:12-13) “Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35), prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* antara lain:

- a. Transparansi,
- b. Akuntabilitas,
- c. Partisipasi,
- d. Efisiensi,
- e. Efektivitas, dan
- f. Saling menguntungkan dan memajukan.

Peneliti menyimpulkan dari pendapat para ahli di atas bahwa kerja sama adalah suatu kegiatan yang lebih dari dua individu yang melakukan pekerjaan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Di dalam masyarakat, ada beberapa jenis kerja sama, menurut Sunarti (2013: 77-78) kerjasama dibedakan menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut.

1) *Bargaining*

Pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.

2) *Kooptasi*

Proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.

3) *Koalisi*

Gabungan dua kelompok atau lebih yang berusaha mencapai tujuan sama.

Misalnya, dua atau lebih partai politik berkoalisi untuk untuk mengajukan seorang calon presiden.

4) *Joint venture*

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi (perusahaan) dalam melaksanakan suatu pekerjaan (proyek). Misalnya, Pertamina mengadakan *joint venture* dengan salah satu perusahaan minyak internasional untuk mengeksplorasi ladang minyak di Blok Cepu, Jawa Tengah.

5) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, kerja sama ada beberapa jenis tergantung situasi dan tujuannya di masyarakat, tetapi pada dasarnya memerlukan keuntungan dan tujuan yang ingin dicapai kedua belah pihak.

4. Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Camat

Kerjasama Pemerintah Desa dengan Camat adalah suatu bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antara Pemerintahan Desa dengan Camat dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Mekanisme kerjasama antar pemerintah lokal telah menjadi isu penting di negara berkembang, dimulai dari bidang yang sangat terbatas seperti pelayanan publik, dan program-program pemerintah baik dari pusat maupun daerah. Seperti Pemerintah Desa dan Camat mengenai pelayanan publik dan menjalankan program-program pemerintah baik dari pusat maupun daerah telah melakukan kerjasama untuk saling mengkoordinasi. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) ini yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial yang bertujuan untuk menuntaskan angka kemiskinan yang danda di daerah-daerah.

Urusan Pemerintahan Desa lebih berdaya guna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mengisyaratkan bahwa kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang kemudian dikelola, mencari menemukan pola, serta memutuskan pola apa yang harus dipublikasikan, Miles dan (Huberman, 2009) mengatakan bahwa model interaktif yaitu analisis data yang menggambarkan sifat interaktif koleksi data. Lebih lanjut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa *data analysis consists of three flows of activity : Data reduction, data display dan conclusion drawing verivatioan* (Bungin, 2003).

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan melakukan penalaran logis. Pendekatan kualitatif dipandang lebih relevan untuk digunakan didalam mengamati, menganalisa fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

KERJASAMA PEMERINTAH DESA PASAR BARU PANGEAN DENGAN

CAMAT DALAM MENUNTASKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PANGEAN TAHUN 2016

1. Kerjasama Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean Dengan Camat

a. Koordinasi

Dalam bentuk jalannya kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean dengan Camat di Kecamatan Pangean dalam menuntaskan kemiskinan melalui pelaksanaan kegiatan PKH pada tahun 2016. Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean mengkoodinasikan data atas setiap penerima atau sasaran bantuan PKH kepada Camat agar penerima bantuan PKH benar tepat sasaran. Dalam bentuk koodinasi ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Secara Langsung

Koordinasi dalam bentuk secara langsung yaitu satu kali pertemuan langsung dengan Camat dalam setahun.

2. Secara Tidak langsung

Koordinasi dalam bentuk tidak langsung merupakan dengan bentuk menyurati.

Dalam bentuk koordinasi yang selalu dilakukan dalam bentuk kerjasama ini adalah koordinasi melalui secara langsung, karena koordinasi secara langsung ini yang sering dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean pada waktu tahap 1 pencairan dana bantuan PKH.

b. Pendataan Untuk Mendorong Adanya Sinkronisasi Data Setiap tahunnya

Dengan terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean dengand Camat dalam pelaksanaan kegiatan PKH pada tahun 2016 dalam menuntaskan kemiskinan kultural yang ada pada Desa Pasar Baru Pangean. Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean bertanggung jawab akan pelaksanaan PKH terkait dengan masyarakat miskin yang berhak akan

mendapatkan bantuan PKH. Dengan hal itu kelancaran dan keefektifan jalannya pelaksanaan PKH tidak lepas dari Pemerintah Desa dan Camat, dikarenakan dalam menentukan sasaran penerima bantuan PKH dilihat dari data BDT dan disurvei langsung ke setiap rumah yang tergolong miskin. Berikut ini tabel tentang jumlah penduduk miskin dengan jumlah sasaran penerima bantuan PKH.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Tahun 2016 Di Desa Pasar Baru Pangean

N O	DESA	JUMLAH RTSM (KK)	JUMLAH SASARAN KPM PKH (KK)
1.	Pasar Baru Pangean	210	47
Total		210	47

Sumber: Survey dan BDT

Dapat diketahui jumlah sasaran penerima bantuan PKH tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada Desa Pasar Baru Pangean pada tahun 2016 ini.

Dengan demikian Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean mendorong adanya sinkronisasi data setiap tahunnya. Karena dalam setiap tahunnya pasti ada perubahan-perubahan dalam hasil verifikasi data untuk sasaran rumah tangga miskin oleh petugas PKH. Dengan melakukan pendataan tersebut bertujuan supaya penerima bantuan PKH itu benar-benar tergolong kedalam kategori miskin.

Dengan dilakukannya pendataan kembali oleh Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean, pihak Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean selalu menginformasikan mengenai pendataan yang dilakukannya kepada Camat agar masyarakat baik itu yang tergolong sederhana maupun miskin dapat disesuaikan dengan kastanya.

c. Pembinaan

Tercapainya suatu tujuan dari kerjasama tidak lepas akan sebuah pembinaan baik dari kedua belah pihak maupun satu pihak. Dalam maksud pembinaan dalam sebuah kerjasama adalah melakukan sebuah pembinaan dan pengawasan agar tujuan dari kerjasama tercapai. Begitu halnya dengan bentuk pembinaan dari Camat kepada Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean dalam penuntasan kemiskinan yang terdapat di Desa Pasar Baru Pangean melalui pelaksanaan PKH pada tahun 2016.

Pembinaan yang dilakukan dalam penuntasan kemiskinan ini adalah pembinaan yang berupa memfasilitasi Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean terkait dalam masalah-masalah dalam pelaksanaan PKH pada tahun 2016. Pembinaan yang berupa memfasilitasi ini dilakukan empat kali dalam satu tahun, yang mana dilakukan pada saat pencairan dana bantuan PKH.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Camat terus melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean dalam kegiatan pelaksanaan PKH di tahun 2016 supaya kegiatan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan PKH dan dapat menuntaskan kemiskinan. Dalam hal ini Camat juga berperan dalam kelangsungan kegiatan PKH pada tahun 2016 tidak hanya Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean karena pihak Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean masih dalam pembinaan terkait dengan penuntasan kemiskinan melalui kegiatan PKH.

Dari proses pembinaan tersebut terkait pelaksanaan PKH pada tahun 2016 yang ada pada Desa Pasar Baru Pangean ini, pihak Camat dan Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean sama-sama mempunyai peranan yang begitu penting dalam pelaksanaan PKH yang terdapat di Desa Pasar Baru Pangean, Dimana peranan yang dimiliki oleh Camat adalah pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan PKH.

Peranan yang dimiliki oleh kedua pihak dalam kerjasama antara Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean dengan Camat sama pentingnya dalam menuntaskan kemiskinan yang terdapat di Desa Pasar Baru Pangean melalui pelaksanaan kegiatan PKH di tahun 2016. Hal itu dapat diketahui kedua belah pihak saling membutuhkan dalam pelaksanaan PKH secara objektif.

2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasar Baru Pangean Tahun 2016

Kegiatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada tahun 2016 di Desa Pasar Baru Pangean dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 47 kepala keluarga jumlah penerima bantuan PKH. Jumlah ini didapat menurut data BDT dan Dinas Sosial. Dari jumlah tersebut, masyarakat yang tergolong kurang mampu atau miskin masih ada terdapat dan malah tidak sama sekali mendapatkan atau mengenyam bantuan PKH ini, sementara masyarakat yang tergolong masyarakat mampu malah mendapatkannya. Hal ini terjadi di Desa Pasar Baru Pangean. Masyarakat menanyakan kepada pendamping PKH akan ketidaktanggapannya dia mengenai bantuan ini.

Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH, langsung menanyakan kepada pendamping PKH atau Kepala Desa akan ketidaktanggapannya dia mengenai bantuan PKH ini. Sementara yang memilih atau yang menentukan masyarakat itu mendapatkan atau tidaknya bantuan PKH ini bukan dari pendamping atau Kepala Desa Pasar Baru Pangean, akan tetapi dari data sensus penduduk yang pernah dilakukan.

Dalam menentukan masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH langsung dari data statistik bukan dari pendamping PKH atau Kepala Desa. Pendamping PKH menginformasikan kepada Kepala Desa mengenai jalannya pelaksanaan PKH, dan Kepala Desa juga mengkoordinasikan kepada Kecamatan atas pendataan.

Pendamping selalu mengkoordinasikan kepada Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean dan Kecamatan atas penyaluran bantuan PKH. Dimana sasaran penerima PKH di Desa Pasar Baru Pangean pada tahun 2016 sebelum di Validasi, sebagai dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) serta Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Pasar Baru Pangean Tahun 2016 Sebelum di Validasi

N O	DESA	JUMLAH PENDUD UK (KK)	JUML AH RTSM (KK)	JUMLA H SASAR AN KPM PKH (KK)
1.	Pasar Baru Pange an	1004	210	47
	Total	1004	210	47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Kuansing, BDT dan Pendamping PKH

Berdasarkan tabel diatas, jumlah sasaran penerima bantuan PKH pada tahun 2016 ini diambil berdasarkan data dari BPS dan BDT, hal itu belum tentu semua sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan bantuan PKH, karena para petugas atau pendamping PKH masih melakukan survey kepada masyarakat-masyarakat yang termasuk dalam sasaran penerima bantuan PKH untuk melakukan validasi akhir atau pemuktahiran data akhir untuk benar-benar tepat sasaran. Dimana hasil validasi akhir atau pemuktahiran data akhir dari data sasaran keluarga penerima, manfaat PKH pada tahun 2016, sebagai tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) serta

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Pasar Baru Pangean Tahun 2016 Setelah di Validasi

N O	D E S A	JU ML A H P E N D U K (KK)	JU ML A H R T S M (KK)	JUMLAH SASARA N KPM PKH (KK)	JUMLAH KPM SETE LAH VALI DASI (KK)
1	Pa sar Ba ru Pa nge an	100 4	210	47	46
Total		100 4	210	47	46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kuansing, BDT dan Pendamping PKH.

Dengan hal ini diketahui dari tabel diatas, setelah melakukan validasi akhir atau pemuktahiran data mengenai sasaran KPM PKH, jelas terlihat terdapat pengurangan KPM di Desa Pasar Baru Pangean. Hal itu dikarenakan adanya KPM yang tidak memenuhi syarat komponen untuk penerima bantuan PKH.

Pendamping PKH melakukan validasi atau pemuktahiran data akhir yang sumber data sebelumnya didapat pada data BPS dan BDT. Pendamping PKH melakukan survey kembali atas data-data yang didapatnya mengenai sasaran penerima PKH, agar pelaksanaan PKH benar-benar tepat sasaran. Dimana hasil dari pendamping melakukan validasi akhir, terdapat banyak KPM di Desa Pasar Baru Pangean, dalam satu kepala keluarga terdapat beberapa komponen bantuan yang didapatnya dan ada juga terdapat pengurangan atau penambahan komponen bantuan dalam satu kepala keluarga, hal itu dikarenakan ada yang telah memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat komponen bantuan PKH.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKH ada pada waktu validasi data atau pemuktahiran data akhir, sebab disitu akan terlihat banyaknya penerima keluarga manfaat PKH yang akan dihitung atau tercantum pada setiap komponen bantuan PKH untuk peserta penerima keluarga manfaat PKH.

Pelaksanaan PKH di Desa Pasar Baru Pangean pada tahun 2016 setelah pendamping PKH melakukan validasi data atau pemuktahiran data akhir di Desa Pasar Baru Pangean, terdapat 46 kepala keluarga penerima bantuan PKH dan terdapat 109 orang yang terdiri dari setiap komponen bantuan PKH. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Jumlah Penerima Bantuan PKH Pada Setiap Komponen PKH Di Desa Pasar Baru Pangean Pada Tahun 2016

N O	D E S A	P E N E R I	KATEGORI		
			KES EHA	P E N D I D I	K E S E J A H T E R

		MA PKH	TAN (ORA NG)	KAN (ORA NG)	AAN SOSIAL (ORAN G)
1	Pasar Baru Pangean	46	17	84	8
TOTAL		46	17	84	8

Sumber : Pendamping PKH

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa keluarga penerima manfaat PKH berjumlah 46 kepala keluarga dari semua komponen bantuan PKH atau 109 orang dari semua kategori komponen. Dari 109 orang yang tergolong dari semua komponen bantuan peserta keluarga penerima manfaat PKH yang ada terdapat di Desa Pasar Baru Pangean. Peserta penerima bantuan PKH terbantu dalam segi perekonomiannya serta bisa berkehidupan yang layak.

Sejak berlangsungnya Program Keluarga Harapan di Desa Pasar Baru Pangean, pada tahun 2012 telah banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH serta terdapat juga perubahan-perubahan penerima PKH disetiap tahunnya. Dimana terdapat peningkatan atau penurunan indeks kemiskinan di Desa Pasar Baru Pangean melalui PKH ini. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

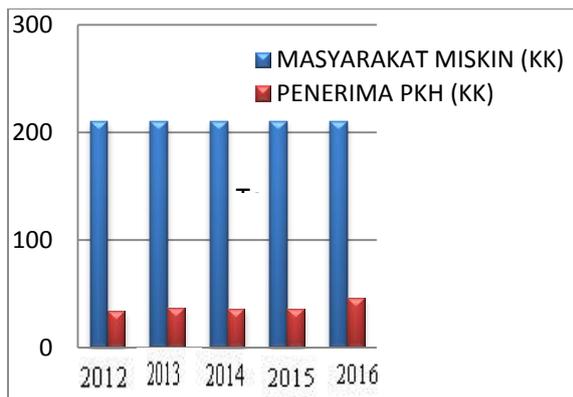
Tabel 5: Jumlah Penduduk Miskin serta Jumlah Penerima PKH Dari Tahun 2012 sampai 2016 Di Desa Pasar Baru Pangean

NO	DESA	TAHUN	MASYARAKAT MISKIN (KK)	PENERIMA PKH (KK)	KATEGORI		
					KESKIHATAN (ORANG)	PENDIDIKAN (ORANG)	KESALAHAN SOSIAL (ORANG)
1	PASAR BARU PANGEAN	2012	210	34	15	65	6
		2013	210	37	13	69	7
		2014	210	36	14	71	4
		2015	210	36	14	71	4
		2016	210	46	17	84	8
TOTAL			109	73	360	29	

Sumber: Pendamping PKH, BPS Kuansing, serta BDT.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sejak awal berjalannya PKH di Desa Pasar Baru Pangean, terdapat peningkatan peserta penerima PKH dari tahun ke tahun sampai akhirnya ditahun 2016 yang memiliki peserta penerima PKH terbanyak. Maka dari itu Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean harus bekerja keras dalam menuntaskan kemiskinan kultural melalui PKH.

Serta dapat kita lihat juga persentasi dari tahun 2012 sampai 2016 pada diagram dibawah ini:



Gambar 1: Diagram Masyarakat Miskin dan Penerima PKH Dari Tahun 2012 Sampai 2016

Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa indeks kemiskinan yang ada pada Desa Pasar Baru Pangean, belum semuanya teratasi dengan tuntas melalui PKH. Akan tetapi kemajuan dari jalannya PKH di Desa Pasar Baru Pangean mengalami peningkatan, hal itu ditandai dengan bertambahnya setiap tahun jumlah penerima PKH di Desa Pasar Baru Pangean. Dengan demikian kelangsungan jalannya PKH yang ada di Desa Pasar Baru Pangean pada tahun 2016 harus menjadi tanggung jawab besar bagi Pemerintah Desa dan Camat serta Pendamping PKH demi tuntasnya indeks kemiskinan yang ada pada Desa Pasar Baru Pangean pada khususnya dan Di Kecamatan Pangean pada umumnya.

Adapun biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk bantuan PKH di Kecamatan Pangean, pemerintah pusat mengeluarkan biaya untuk disalurkan kepada penerima bantuan PKH yang ada di Kecamatan Pangean sebesar Rp.579,354,059,- dan di Desa Pasar Baru Pangean sebesar Rp.33,962,500,- pada tahun 2016. Biaya itu merupakan dari dana APBN

3. Hambatan Pelaksanaan PKH Di Desa Pasar Baru Pangean Tahun 2016

Pelaksanaan kegiatan PKH di Desa Pasar Baru Pangean pada dasarnya sedikit memiliki hambatan, dimana hambatan dalam pelaksanaannya pada tahun 2016

adanya masyarakat kurang mampu yang masih menanyakan kepada para pendamping PKH atau kepala desa tentang ketidakdapatnya masyarakat kurang mampu mengenai bantuan PKH.

Permasalahan tentang masih adanya masyarakat kurang mampu mengenai ketidak dapatnya bantuan PKH di Desa Pasar Baru Pangean merupakan tanggung jawab besar bagi Pemerintah Desa dan Kecamatan dan Pendamping PKH. Pendamping PKH yang menjadi tempat sasaran masyarakat untuk menanyakan ketidak dapatnya bantuan PKH.

Masyarakat di Desa Pasar Baru Pangean masih ada masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan PKH, sehingga mereka menanyakan tentang bantuan PKH terhadap para pendamping PKH dan Kepala Desa.

Permasalahan ketidak tepat sasaran penerima bantuan PKH pada umumnya terletak pada pendataan atau sumber datanya yang tidak akurat atau margins error. Oleh sebab itu masih ada kekeliruan tentang penetapan masyarakat penerima bantuan PKH. Serta adanya masyarakat yang perekonomiannya telah berubah sesudah waktu pensensusan penduduk atau diwaktu pendataan.

Hal itu juga di nyatakan oleh pendamping PKH di Desa Pasar Baru Pangean, dimana pernyataannya:

“selain dari margins error atau data tidak akurat, masyarakat yang sebelumnya tergolong masyarakat kurang mampu pada saat pendataan penduduk dan masyarakat yang tergolong kurang mampu telah berubah perekonomiannya atau tidak tergolong kurang mampu lagi. Seperti ini lah menimbulkan kecemburuan antara masyarakat yang menerima dan yang tidak menerima”. (Wawancara dengan Memeng Fauzi, ST. 16 Mei 2017)

Pernyataan pendamping PKH bahwa semua permasalahan mengenai ketidak tepat sasaran pada intinya terletak

pada sumber data, dimana bantuan ini pelaksanaannya dilihat dari sumber data sehingga masalah ini sering terjadi karena 100% sumber data itu tidak benar-benar akurat pasti ada kekeliruan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerjasama antara Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean dengan Camat di Kecamatan Pangean, dimana Pemerintah desa harus mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan data kepada Kecamatan sehingga Kecamatan mensinkronisasikan kembali data dalam menuntaskan kemiskinan serta selalu menginformasikan semua kegiatan, dan melakukan pembinaan oleh Camat terhadap Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean dalam kegiatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Pasar Baru Pangean pada tahun 2016.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan yang paling penting atau utama mengenai efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah sumber data yang valid. Sumber data pada waktu sensus penduduklah mengetahui masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan PKH. Dalam sensus penduduk dituntut agar pelaksanaan PKH benar-benar tepat sasaran bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Pasar Baru Pangean.

SARAN

1. Mengacu kepada kerjasama Pemerintah Desa dengan Kecamatan supaya program-program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pelaksanaannya ada di Kecamatan

mengenai penanggulangan kemiskinan dapat di awasi dan di bina agar terwujudnya program itu sesuai dengan tujuan yang di harapkan dan dapat mengurangi indeks kemiskinan supaya masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan, lebih ditingkatkan lagi dalam menentukan sumber data targeting untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Agar hak masyarakat yang pantas menerima bantuan Program Keluarga Harapan benar-benar tepat sasaran dan tidak kemungkinan untuk terjadi kecemburuan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anjawaningsih.2006. Kerja sama. Jakarta. Gramedia Jakarta
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo.
- Considerations”, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (ed). 1986. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Edralin dan Whitaker.2009. prinsip *good governance*. Jakarta. Bina Aksara
- Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-format penelitian social*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Friedman, J. 1979. “Urban Poverty in America Latin, Some Theoretical
- Henry, N. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall.
- Huberman, Michael. 2009. *Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-*

- metode Baru*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Khomsan, Ali Dkk. 2015. *Indikator dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Diktat Kuliah Program Magister Administrasi Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Pamudji S. 1985. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan Dari segi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Parsudi Surparlan. 1995. *Kemiskinan Dipertanyaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Persada, Jakarta
- R. Harry Hikmat. 2016. *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2016*. Jakarta: Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Soekanto, Soerjono. , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo
- Suhardi, Sunarti Sri. (2013). *Sosiologi Kelas 10*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryawati Chriswardani, 2004, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Bank, 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*.
- Zulkarnain. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: Ardana Media.
- Dadan Hidayana. 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Instituts Pertanian, Bogor.
- Maimun Sholeh. *kemiskinan: telaah dan beberapa strategi penanggulangannya*.
- Nurfadilah. 2015. *Efektifitas Kerjasama Indonesia – Usaid Dalam Penanganan Kemiskinan Untuk Mencapai MDGS 2015*. Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Rahmawati, Y. I. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemiskinan*.
- Regina Pamela Saroinsong. *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utar*.
- Sonni Ansori. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan Di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Patrang Kabupaten Jember 2009)*. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Jember.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 66A/LJS/04/2012 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan Program Keluarga Harapan Di Provinsi Pelaksanaan PKH Tahun 2012.
- Keputusan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 78/SK/JS/IX/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Pengembangan Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Di 50 Kabupaten/Kota Pada 25 Provinsi Tahun 2012.
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor:

261/LJS/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan PKH Di Provinsi Pelaksana Tahun 2014.

Zainudin dalam Website www.etd.library.ums.ac.id, (Diakses 18 November 2016 Pukul 1.43 WIB).

Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 20/LJS/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kecamatan Pada Kabupaten/Kota Pelaksana Prgoram Keluarga Harapan Tahun 2015.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 31/KEP/MENKO/- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program KeluargaHarapan (PKH).

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH).

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.

Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Internet dan Web

Edralin dan Whitaker, 2007 dalam Keban, melalui Website <http://www.etd.library.ums.ac.id> (Diakses 18 November 2016 Pukul 2.28 WIB).

<http://:Gloablvebookx.blogspot.com> > home >Ekonomi > pengertian.(Diakses 7 Desember 2016 Pukul 2.05 WIB).

<http://: e-jurnal.uajy.ac.id>. (Diakses 7 Desember 2016 Pukul 2.21 WIB).

Soejono Soekamto dalam Anjawaningsih, 2006, *Pengertian Kerjasama* (Online) tersedia: http://www.onlinesyariah.com/2014/07/29/_____pengertian-kerjasama-menurut-para-ahli. (Diakses 18 November 2016 Pukul 2.16 WIB).

